

## DINAMIKA DEMOKRASI ELEKTORAL (Studi tentang Sentimen Anti-Partai di era Reformasi)

Muhammad Diki (181011500211)<sup>a,1\*</sup>, Nurmalasari (181011500078)<sup>b,2</sup>,

<sup>a</sup>Muhammad Diki; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang

<sup>b</sup>Nurmalasari ; Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang

<sup>1</sup>sadegadicki@gmail.com; <sup>2</sup>snurmala141@gmail.com;

\*korespondensi penulis

Naskah diterima: 18-07-2021, direvisi: 19-07-2021, disetujui: 18-07-2021

---

### Abstrak

---

Keberadaan partai politik di suatu negara oleh banyak sebagai bentuk pengakuan hak-hak sipil dan politik, dan akibatnya keberadaan partai politik awal dalam proses warga egalitarianism politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologis, untuk melihat arti dari subjek memahami struktur, studi dokumentasi juga menempatkan inti wawancara mendalam sebagai pengumpulan data. Penguatan sentimen anti-partai kita dapat ditelusuri dari pemilu beberapa kali di era reformasi: 1999, 2004, dan 2009, dengan penurunan partisipasi pemilih, volatilitas pemilih dan identifikasi partai menurun, yang kemudian juga diperkuat oleh hasil survei yang dirilis oleh lembaga, menunjukkan implikasi dari sentimen anti-partai, baik reaktif atau budaya.

**Kata-kata kunci:** Partai Politik, Sentimen anti-partai, Demokrasi

---

### Abstract

---

*The existence of political parties in a country by many as a form of recognition of civil and political rights, and consequently the existence of political parties early in the process of citizens of political egalitarianism. This study uses a phenomenological approach, to see the meaning of the subject understanding the structure, the study of documentation also places the core of in-depth interviews as data collection. The strengthening of our anti-party sentiment can be traced from the elections several times in the reform era: 1999, 2004, and 2009, with a decrease in voter participation, voter volatility and decreased party identification, which was then also strengthened by the results of a survey released by the institution, showing the implications of anti-party sentiment, whether reactive or cultural.*

**Keywords:** Political Parties, Anti-party sentiment, Democracy

## **PENDAHULUAN**

Demokrasi selama ini dipercaya sebagai jalan “pencerahan”, emansipasi social, sine quanon perkembangan manusia, yang tanpanya tak ada kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan. Demokrasi menjadi semacam “jalan Tuhan” merealisasikan utopia. Sehingga “demokratisasi” dianggap sebagai sebuah proses positif-konstruktif absolute dalam mencapaitujuan emansipatif, seakan sejarah emansipasi manusia tak lebih dari manifestasi logis “esensidemokrasi” itu sendiri (Danujaya, 2012;75).Partai politik diyakini sebagai instrumen yang strategis bagi perkembangan demokrasimodern Indonesia di masa depan. Namun sejak era reformasi terlihat adanya penurunan tingkatkepercayaan masyarakat terhadap partai politik, hal ini dapat dilihat menurunnya angkapartisipasi masyarakat pada pemilu-pemilu reformasi, dan tingginya volatilitas pemilih sertapenurunan identifikasi partai. Kondisi demikian mengiibaratkan partai politik layaknya setanyang dibutuhkan – necessary evil – , pada saat yang bersamaan Negara modern tidak memilikialternative instutusi untuk menopang bekerjanya demokrasi seluar partai politik.Berdasarkan latar belakang dan permasalahan tersebut, maka penulis membuatkesimpulan untuk menjadi rumusan masalah sebagai berikut ; Bagaimana dinamika perkembangan dan pelembagaan partai politik pasca reformasi?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Dinamika Demokrasi Elektoral Pasca Reformasi 1999-2009**

#### **a. Musim Tanam Demokrasi Elektoral**

Pemilu 1999 merupakan awal dari pelaksanaan transisi dari demokrasi pasca keluar dari rezimorde baru. Selama orde baru pemilu telah dilakukan sebanyak 6 kali yaitu pada tahun 1971,1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997. Dari sekian pemilu yang telah dilakukan tidak mengabarkandemokrasi yang substantif, dimana partai politik dipaksa untuk melebur diri pada pembilahanberdasarkan aliran, yaitu nasionalis dan agama oleh penguasa pada tahun 1973. Denganpeleburan partai yang berkontestasi pada pemilu 1971 maka masyarakat dan elit partai padawaktu itu tidak mempunyai pilihan lain. dengan dileburnya partai-partai pada term aliran tersebuttentunya memunculkan konflik tersendiri di dalam partai hasil fusi tadi. Tidak berhenti sampaidisitu, kemampuan penguasa untuk mengintervensi dalam partaipartai tersebut sangat kuatkhususnya dalam penentuan keputusankeputusan yang sifatnya strategis seperti pemilihan ketua umum partai (PPP dan PDI). Di sisi yang lain, penguasa melalui Golkar mendominasi suara padapemilu dari periode ke periode pemilu. Kemampuan penguasaa melalui alat-lat negara sepertimiliter dan birokrasi tentunya menjadi kekuatan yang efektif dalam menggerakkan masyarakat atau pemilih untuk menyuarakan pemilihan ke Golkar.Dengan situasi seperti itu maka tidak

mengherankan ketika Golkar selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu

### **b. Mencari Format Demokrasi Prosedural**

Dengan perubahan format ini, maka mulai pemilu 1999 Indonesia dalam sistem kepartaiyan berganti dengan multi partai tidak lagi dwi partai. Eforia politik ini memang sangat terasa saat menjelang pemilu, partai yang mendaftar sebanyak 141 partai akan tetapi setelah diverifikasi mengerucut menjadi 48 partai politik peserta pemilu. Secara kategoris, dari 48 partai peserta pemilu 1999 dibedakan dalam 3 kelompok besar partai (Pamungkas, 2009:92); pertama, partai yang mengambil jalur kelas. Kedua, partai yang mengambil jalur aliran. Ketiga, persilangan antara partai yang mengambil jalur kelas dan aliran melahirkan kelompok partai yang bersifat catch all. Pada pemilu 1999 partai yang berhak ikut kontestasi dalam pemilu adalah partai-partai yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut; memiliki kepengurusan lebih dari 1/2 dari jumlah provinsi, setiap provinsi memiliki kepengurusan 1/2 dari jumlah kabupaten, untuk dapat mengikutipemilu berikutnya partai harus memiliki 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD provinsi/kabupaten-kota yang tersebar kurang dari 1/2 jumlah provinsi dan di 1/2 jumlah kabupaten seluruh Indonesia. Pemilu 1999 dengan multi partai tidak menghasilkan kursi parlemen didominasi oleh satu partai politik, meskipun partai tersebut menang dalam pemilu. Sangatlah masuk akal ketika pemilu dengan sistem multi partai maka tidak akan menghasilkan suara mayoritas di tingkat parlemen. Hal yang menarik kemudian

dicermati adalah kekuatan-kekuatan politik hasil pemilu 1999 dapat terakomodir atau bisa dikatakan kekuasaan di pemerintahan dapat dibagi habis kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada. Mulai dari Presiden, wakil Presiden, Ketua MPR dan Ketua DPR di isi

oleh partai politik berbeda yang pada sebelumnya mereka bertarung dalam pemilu maupun dalam parlemen. Tercatat, komposisi kabinet terdiri dari 6 wakil TNI, 5 wakil fraksi reformasi, 4 wakil partai Golkar, 4 wakil PDIP, 8 wakil PKB, 2 wakil PPP dan 1 wakil dari PBB (Pamungkas, 2009:99).

### **c. Pemilu 2004**

Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, pada pemilu tahun 2004 ada perubahan yang mendasar baik dari segi pemilihan dan keterwakilan. Sebagai respons dari ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari Jawa dan luar Jawa yang disebabkan konsentrasi jumlah penduduk berada di Jawa. Anggota DPD dipilih melalui Pemilu bersamaan dengan Pemilu Legislatif dan setiap provinsi diwakili oleh 4 orang anggota DPD tersebut. Syarat pemilu 1) memiliki kepengurusan lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari seluruh jumlah provinsi. 2) memiliki pengurus lengkap sekurang-kurangnya di 2/3 dari jumlah kabupaten/kota di provinsi. 3) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau sekurang-kurangnya 1/1000 dari jumlah penduduk pada setiap kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan kartu tanda anggota partai. 4) partai politik harus mempunyai kantor tetap.

Berdasarkan persyaratan 24 partai lolos, 6 dari 24 partai otomatis mengikuti pemilu. 18 diantaranya merupakan perubahan dari partai yang tidak lolos electoral

threshold dan partai baru seperti Demokrat, Persatuan daerah dan terakhir pecahan partai lama. Terdapat 550 kursi anggota DPR. Sistem yang dipakai sama dengan pemilu 1999, yaitu perwakilan proporsional terbuka (proportional representation system-open list). Secara teoritik, sistem ini menjadikan partai politik akan memperoleh kursi sebanding dengan perolehan suara.

Terkait dengan electoral threshold, syarat untuk partai politik dapat mengikuti pemilu berikutnya dengan 3% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4% dari jumlah kursi DPRD provinsi yang tersebar sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  jumlah provinsi seluruh Indonesia atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 % jumlah kursi DPRD kab/kota yang tersebar di  $\frac{1}{2}$  jumlah kab/kota seluruh Indonesia. Dibanding pemilu 1999 antusiasme pe ilih di 2004 mengalami penurunan yang signifikan, menurut Direktur Eksekutif CentreFor Electoral Reform (Cetro) Hadar NGumay menguraikan, pada tahun 1999 tingkat partisipasi dalam Pemilu tercatat 92 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 menurun dan mencapai 84,1 persen (Kompas.com, 2011/10/19). Fenomena tersebut mungkin disebabkan peristiwa-peristiwa politik, konflik sosial, ekonomi yang tidak kunjung membaik serta persoalan keamanan nasional yang dihubungkan dengan persoalan terorisme.

Pemilu legislatif dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden dan wakil presiden, dimana pemilu 2004 diikuti 5 pasang calon. Pada pemilihan presiden, kandidat yang memenangi pemilu manakalah memperoleh 50 % lebih suara sah. Akan tetapi karena peserta relatif banyak maka hal ini memaksa untuk dilanjutkan putaran kedua tgl. 20 September 2004. Pada pemilihan putaran pertama Dua pasang yang

memperoleh suara terbanyak yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono -J. Kalla dengan 22.58% suara dan Megawati-Hasyim M. dengan 26.24% suara. Dalam pemilu Presiden langsung yang pertama kali dilakukan di Indonesia, kandidat presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik. dimana partai politik yang sekurangnya memperoleh 15 % kursi di DPR atau 20 % dari perolehan suara sah secara nasional dalam pileg.

#### **d. Pemilu 2009**

Pemilu 2009 diikuti oleh 28 partai politik akan tetapi hanya 9 partai saja yang lolos dari parliamentary Threshold dan terdapat 2 partai baru yaitu partai Gerindra dan Hanura. Meskipun partai baru akan tetapi partai tersebut mampu bersaing dalam memperoleh suara dengan partai-partai yang sudah mengikuti pemilu sebelumnya. Dengan perolehan suara yang masih dibawah partai-partai lama dengan 4.46% untuk Gerindra dan 3.77% untuk Hanura cukup mengantarkan kader mereka duduk di DPR. Dalam pemilu presiden tahun 2009 terdapat 3 pasang calon; yaitu pasangan J.Kalla-Wiranto, Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono, MegawatiPrabowo. Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono meskipun menang dalam pemilu dengan dukungan 20.85 % kursi di DPR tentunya tidak cukup dalam mengamankan kekuasaannya. Maka partai demokrat membutuhkan dukungan dari partai lain dalam mengamankan pemerintahan atau dukungan kebijakan-kebijakan dikemudian hari. Maka dalam susunan kabinet sangat terlihat sekali dimana koalisi yang lebih pada bagaimana

mengamankan kekuasaan koalisi yang terbangun diantaranya ; Partai Demokrat, PAN, PKS, PKB, PPP, Golkar.

## **2. Sentimen Anti-Partaisme**

Pemilu 1999 harapan besar periode pertama untuk mendingkai kembali harapan berbangsa dan bernegara kearah yang lebih baik, euforia harapan tersebut tampak dengan tingkat partisipasi

publik mencapai 92% dari total pemilih 171. 265. 422. Periode pasca pemilu 1999-2004 negara (DPR dan MPR) mendesain ulang kelembagaan politik antara eksekutif dan legislatif menuju *checks and balances* sistem Presidensialisme yang lebih mapan. Namun, tingkat partisipasi dan kepercayaan publik pada partai politik tidak bertahan lama, lambat laun tingkat keikutsertaan publik pada pesta demokrasi (baca; pemilu), mengalami penurunan secara terus menerus (23,34 persen pada pemilu 2004. Bahkan pilpres putaran pertama angka golput mencapai 21,5 persen, angka ini meningkat menjadi 23,3 persen pada pilpres putaran kedua. Peningkatan angka Golput tidak hanya terjadi di pemilu legislatif dan pilpres, namun juga terjadi dalam pilkada yang rata-rata berkisar 27,9) Gejala ketidak-ikutsertaan publik dalam demokrasi elektoral ini dapat dinyatakan sebagai bentuk sentimen anti-partaisme. Terdapat dua bentuk anti-Partaisme, yakni anti-partaisme reaktif dan antipartaisme kultural (Dalam Pamungkas, 2011;226). Anti-Partaisme reaktif adalah sebuah sikap kritis dari warga negara dalam merespon ketidakpuasan mereka terhadap kinerja elit dan istitusi partai.

Sedangkan anti-partaisme kultural adalah ekspresi ketidak-senangan terhadap eksistensi partai.

politik dalam sebuah negara dan melakukan penolakan terhadap keberadaan partai politik, ketika anti-partaisme reaktif masih memberikan toleransi terhadap partai politik akan tetapi publik kecewa dengan kinerja partai politik. Berkembangnya sikap anti-partai dalam pandangan Philips Vermote, merupakan bentuk

kedewasaan berpolitik dalam artian selalu meletakkan curiga ‘mengkritisi’ kekuasaan :“Hasil survei menunjukkan antipartai tapi dari sisi kebajikannya memang jangan percaya apapun yang dikatakan politisi, kita memang harus selalu mencurigai kekuasaan” ([www.beritasatu.com](http://www.beritasatu.com)). Sentimen negatif dan ketidakpercayaan terhadap partai politik tentu bukan sesuatu yang muncul sekejap, melainkan merupakan suatu proses akumulasi kekecewaan setelah kita melalui tiga kali pemilu demokratis. Asal muasalnya adalah pada periode awal masa reformasi, di mana partai gagal menjawab euforia demokrasi, harapan, dan tingkat kepercayaan rakyat yang begitu tinggi terhadap partai. Kegagalan ini berimbas pada munculnya ketidakpercayaan terhadap partai dan membuat masyarakat semakin banyak yang pragmatis. Rakyat yang pragmatis, seperti juga para politisi, tidak lagi berpikir panjang. Mereka tak lagi percaya janji-janji partai (Tanuwidjaja, nasional.kompas.com, 2012/03/14) Situasi ini akhirnya memperkuat pola perilaku partai yang pragmatis karena hanya dengan berlaku semakin pragmatis mereka bisa memenuhi permintaan rakyat yang semakin pragmatis pula.

Siklus ini terus berlanjut dan sejalan dengan waktu sentimen negatif terhadap partai yang dipupuk dengan pragmatisme politik semakin menjalar dan mengakar. Peran parpol sebagai salah satu faktor penting dalam memasuki fase konsolidasi demokrasi ternyata belum bisa diharapkan. Fungsi parpol harus dijernihkan kembali agar parpol bisa dihadirkan kembali sebagai pilar utama penopang sistem demokrasi konstitusional. Hal itu bisa dilakukan hanya dengan menumbuhkan kembali apa yang oleh HA Giroux (1992) disebut

sebagai suatu budaya baru, yaitu sebuah budaya yang didefinisikan sebagai acuan dan praktik bagi kewarganegaraan yang kritis, perjuangan untuk demokrasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan umum (*bonum commune*). Dengan kata lain, diperlukan sebuah transformasi kultural untuk merekonstruksi struktur kekuasaan. Kekuasaan memang sungguh memikat, namun pesona dari kekuasaan tersebut bisa berubah mengeroposkan komitmen pada nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas. Parpol yang hakikatnya merupakan instrumen untuk meraih kekuasaan kini telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik. Patrick Dobel (1999) pernah mengemukakan bahwa seseorang yang mengejar kuasa bisa mengalami deindividuasi (*deindividuation*), yaitu suatu situasi saat seseorang merasa terbebas dari pembatasan moral dalam dirinya yang bisa berakibat hilangnya perasaan identitas diri dan tanggung jawab. Orang-orang yang mengalami proses deindividuasi inilah yang kini telah membajak parpol, sehingga parpol kian mengalami krisis jati diri. Menjernihkan kembali fungsi parpol dengan

membebaskannya dari para pembajak tersebut akan mencegah kembalinya rezim totaliter yang siap membajak sistem demokrasi justru atas nama kegagalan parpol dalam meredefinisi dan menjernihkan fungsi dirinya sebagai pilar utama penopang demokrasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Harapan besar pasca reformasi politik menuju ke konsolidasi demokrasi yang pada akhirnya mencapai kematangan demokrasi ternyata belum kunjung terwujud. Kekuasaan membutuhkan legitimasi dari warga negaranya, bentuk legitimasi kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah

tingkat partisipasi warga negara dalam politik (pemilu). Dilihat dari periode ke periode pemilu tingkat partisipasi warga negara terus menurun, baik pemilu legislatif maupun eksekutif pada tingkat pusat maupun daerah. Peran parpol sebagai salah satu faktor penting dalam memasuki fase konsolidasi demokrasi ternyata belum bisa diharapkan. Fungsi parpol harus dijernihkan kembali agar parpol bisa dihadirkan kembali sebagai pilar utama penopang sistem demokrasi konstitusional. Parpol yang hakikatnya merupakan instrumen untuk meraih kekuasaan kini telah keropos justru oleh ambisi meraih kekuasaan tanpa kejujuran dan akuntabilitas dari para elite politik.

Dari persoalan diatas maka partai politik harus mengembalikan kepercayaan publik yang termpuruk pada dewasa ini. Hal tersebut dapat dilakukan dengan merevitalisasi partai politik mulai dari proses rekrutment, kaderisasi, pendidikan politik dan juga menciptakan transparansi keuangan partai politik. Selain itu juga partai politik harus menjaga konsistensi antara ideologi partai

dengan; pertama, kebijakan atau program yang dihasilkan ketika partai tersebut masuk menjadi penentu kebijakan. Kedua, pola koalisi yang relevan dengan ideologi atau garis partai.

## DAFTAR PUSTAKA

Ambardi, Kuskirdho. *Mengungkap politik Kartel: Studi Tentang Sistem Kepartaian di Indonesia Era Reformasi*. PT. Gramedia Pustaka Utama kerja sama Lembaga Survey Indonesia. 2009

Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta. Gramedia Pustaka Utama. 2008

Bungin, Burhan. (ed). *Metodologi Penelitian Kualitatif : Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2008

Danujaya, Budirto. *Demokrasi Disensus Politik Dalam Paradoks*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 2012

Dhakidae, Daniel. "Partai-partai Politik, Demokrasi, dan Oligarki", dalam *Tim Litbang Kompas*, "Partai-Partai Politik Indonesia, Ideologi dan Program", Kompas, 2004

Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolodation*, IRE Press, Yogyakarta, 2003

Efriza, *Political Explore; Sebuah Kajian Ilmu Politik*, Alfa Beta, Bandung, 2012.

Fadillah Putra. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2003.

Gerald F. Gaus et. All, *Handbook Teori PolitiK*, Nusa Media, Bandung, 2012

Georg Sorensen, " *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Dunia yang Sedang Berubah*", Pustaka Pelajar kerjasama Center for Critical Studies, Yogyakarta, 2003

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indoensia : Konsolidasi Demokrasi Pasca-OrdeBaru*, Penerbit Kencana, Cet Ke-3 2012

Miles, Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tantang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press

Pamungkas, Sigit Perihal Pemilu, *Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIPOL UGM*. Yogyakarta, 2009.

----- *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, Institute For Democracy and Welfarism. Yogyakarta. 2011.

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Grasindo, Jakarta. 1992.

Suyatno, *Menjelajah Demokrasi*. Humaniora. Bandung. 2008.

Utsman, Sabian., (2007). *Anatomi Konflik dan Solidaritas Masyarakat Nelayan; Sebuah Penelitian Sosiologis*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta

## Media Online dan Surat Kabar

Jajak Pendapat Kompas "Saatnya Titik Balik Partai Politik", 2010. <http://www.ditpolkom.bappenas.go.id>

Hasil Survey LSI (15-24 Maret 2007)

*<http://nasional.kompas.com/read/2011/10/19/22585240/Tingkat.Partisipasi.Pemilih.Terus.Merosot>*

*[www.mpk.muhammadiyah.or.id](http://www.mpk.muhammadiyah.or.id)*

*[http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku\\_h.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf)*

*<http://partai.info/pemilu2009/hasilpevilululegislatif.php>*

*Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*  
*[www.kpu.go.id/dmdocuments/saku\\_h.pdf](http://www.kpu.go.id/dmdocuments/saku_h.pdf)*